

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.112/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
MALANG TAHUN 2017

**RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam

menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

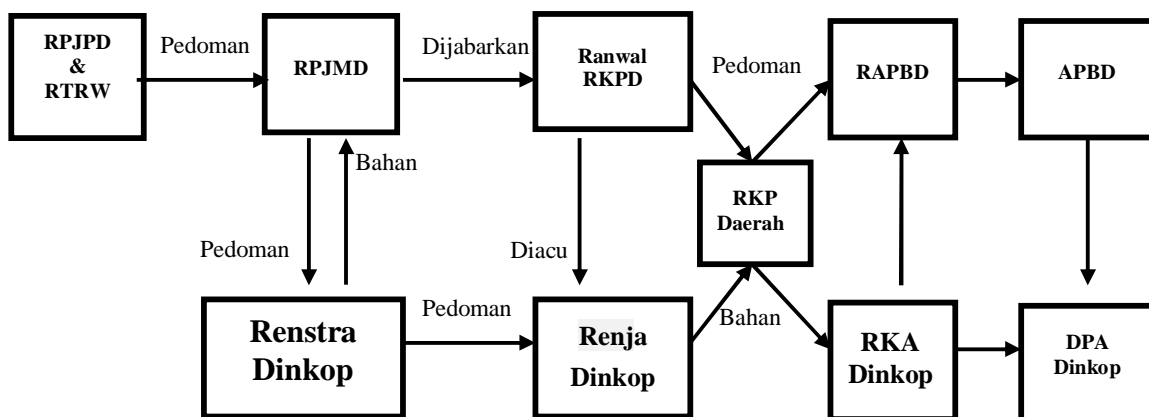
Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021 dan tidak menyimpang dari RKPD tahun 2016 serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021. Rencana Kerja (Renja) PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah tahun 2017 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun

2017 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2017, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan dalam mendukung Misi ke 3 Bupati Malang yaitu Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia dan misi ke 4 Bupati Malang yaitu Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renja Kementerian Koperasi dan UKM 2017 yaitu Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Dan juga berkaitan dengan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur yaitu Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
20. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.4/567/KEP/421.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Tujuan menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun 2017 serta mewujudkan efisiensi dan epektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2016 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 10 program dan 39 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2016 dapat terealisasi rata-rata 75,48%. Tingkat realisasi penyerapan anggaran tertinggi pada triwulan ke tiga tahun 2016 pada program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif sebesar 97,86% karena program tersebut sudah dilaksanakan pada Triwulan I dan triwulan II, sedangkan Tingkat realisasi penyerapan anggaran terendah pada triwulan ke tiga tahun 2016 pada program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar 48,78% karena program tersebut ada sebagian yang belum dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2016
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2016	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN 2016 (TAHUN BERJALAN)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2015	REALISASI RENJA PD TAHUN 2015	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = 9	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan kelancaran administrasi perkantoran	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	21.250 surat	-	-	-	-	4.250 surat	4.250 surat	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	660 kali	-	-	-	-	108 kali	108 kali	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	60 kali	-	-	-	-	12 kali	12 kali	100

4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	5 eksemplar	-	-	-	-	1 eksemplar	1 eksemplar	100
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6.750 pack	-	-	-	-	1.350 pack	1.350 pack	100
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	10 orang	-	-	-	-	10 orang	8 orang	100
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	15 orang	-	-	-	-	15 orang	14 orang	100
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	5 unit	-	-	-	-	-	-	100

2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	15 unit	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	12 unit	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	12 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100
6	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	100
7	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	5 unit	-	-	-	-	-	-	-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Cakupan pemenuhan kompetensi Disiplin Aparatur	100 %	-	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia	5 unit	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	260 seragam	-	-	-	-	-	-	-
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	55 orang	-	-	-	-	10 orang	10 orang	100

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	15 jenis laporan	-	-	-	-	3 jenis laporan	3 jenis laporan	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
VI	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Meningkatnya kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	135 koperasi/KUD	-	-	-	-	27 koperasi/KUD	9 koperasi/KUD	33
2	Penguatan Sarana dan Prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	-	-	-	-	-	1.200 orang	1.200 orang	100

VII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Cakupan SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Peserta (pengurus dan anggota koperasi) Bimtek dalam Terjalannya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian.	350 koperasi	-	-	-	-	70 koperasi	12 koperasi	17
2	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	9.000 orang	-	-	-	-	2.800 orang	2.000 orang	71
VIII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Cakupan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	450 koperasi	-	-	-	-	-	-	-
2	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah koperasi yang dipantau yang menerima dana pemerintah	1.000 koperasi	-	-	-	-	200 koperasi	200 koperasi	100

3	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah Sarana dan prasarana Gedung PLU-KUMKM	1 paket	-	-	-	-	75 orang	-	0
4	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	jumlah orang yang diberikan Layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UKM)	1.500 orang	-	-	-	-	300 orang	175 orang	100
5	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan di Tingkat Nasional	25 KUMKM	-	-	-	-	6 KUMKM	6 KUMKM	100
6	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan retail dan Bimtek pengembangan usaha PKL	350 koperasi	-	-	-	-	70 koperasi	33 koperasi	47
7	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah koperasi penerima dana pemerintah yang di monitoring dan dievaluasi	175 koperasi	-	-	-	-	35 koperasi	16 koperasi	46

IX	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang diberikan Bimtek pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi	700 kopwan	-	-	-	-	150 kopwan	30 kopwan	20
2	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah KEP (kelompok Ekonomi Produktif) yang diberikan Bimtek perkoperasian	50 KEP	-	-	-	-	5 KEP	2 KEP	40
3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang berprestasi dan mendapat penghargaan	25 koperasi	-	-	-	-	5 koperasi	5 koperasi	100
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan administrasi	900 koperasi/KSP/P/USP	-	-	-	-	180 koperasi/KSP/USP	180 koperasi/KSP/USP	100
X	Program Peningkatan Pelayanan	Persentase Tingkat kelancaran pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100
1	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	700 UMKM dan 25 Koperasi	-	-	-	-	140 UMKM dan 5 Koperasi	140 UMKM dan 5 Koperasi	100

Dengan melihat Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai 10 program yang terdiri dari 33 kegiatan dan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 pada triwulan ke III (tiga) sudah terealisasi rata rata sebesar 75 % sehingga Kegiatan tetap berjalan dan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target, sedangkan untuk target Renstra Tahun 2016 s/d 2021 Pemanfaatan dana tepat sasaran bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sampai saat ini naik 65 % dari target semula. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung Pengarus Utamaan Gender meliputi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah serta Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari PD, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya kendaraan dinas sebagai sarana transportasi mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang dengan kegiatan antara lain : koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi, Pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi.

Dengan keterbatasan kendaraan Dinas yaitu : 4 unit kendaraan roda empat, 1 unit untuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 3 Unit mobil operasional, demikian juga kendaraan roda dua ada 23 unit dengan kondisi rusak berat 17 unit diusulkan dihapus, sehingga masih kurang 10 unit kendaraan roda dua, mengingat jangkauan dan pelaksanaan cukup luas dan padat seringkali mengalami kendala, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada intinya adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang meliputi:

- a. Sebagai Lembaga yang membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Melaksanakan Supremasi Hukum di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Menumbuh dan Mengembangkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas konsultasi dan informasi bagi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memperluas akses pasar;
- f. Meningkatkan Akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya produktif pada Masyarakat;
- g. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
- h. Mengembangkan Pola Kerjasama Kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Perbankan, Swasta, BUMN / BUMD dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- i. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data untuk kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
- j. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencapaian kinerja fasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik terutama dengan adanya UPTD PPK BLUD Dana Bergulir serta Griya KUKM dan Klinik UKM, maka dapat memberi dukungan maupun memberikan fasilitas kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sehingga akan semakin mengalami peningkatan dengan harapan akan berdampak positif bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

19	Jumlah Mebeleur yang tersedia	-	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	1 unit	1 unit	
20	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
21	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	-	-	50 seragam	-	50 seragam	50 seragam	50 seragam	-	50 seragam	50 seragam	
22	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	-	-	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	
23	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	3 jenis laporan	
24	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
25	Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	-	-	27 koperasi/KUD	27 koperasi/KUD	27 koperasi/KUD	27 koperasi/KUD	27 koperasi/KUD	9 koperasi/KUD	27 koperasi/KUD	27 koperasi/KUD	
26	Jumlah Peserta (pengurus dan anggota koperasi) Bimtek dalam Terjalinnnya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian.	-	-	65 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	65 koperasi	12 koperasi	70 koperasi	70 koperasi	
27	Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	-	-	-	2.800 orang	-	-	-	2.000 orang	-	-	
28	Jumlah koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	-	-	-	-	90 koperasi	90 koperasi	-	-	90 koperasi	90 koperasi	
29	Jumlah koperasi yang dipantau yang menerima dana pemerintah	-	-	187 koperasi	200 koperasi	200 koperasi	200 koperasi	187 koperasi	200 koperasi	200 koperasi	200 koperasi	
30	jumlah Sarana dan prasarana Gedung PLUT-KUMKM	-	-	95 orang	75 orang	1 paket	1 paket	95 orang	-	1 paket	1 paket	
31	jumlah orang yang diberikan Layanan berupa Fasilitas, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UKM)	-	-	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	175 orang	300 orang	300 orang	
32	jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pamerkan di Tingkat Nasional	-	-	18 KUMKM	6 KUMKM	5 KUMKM	5 KUMKM	18 KUMKM	6 KUMKM	5 KUMKM	5 KUMKM	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Malang yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep" adalah dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkopersian dan perundang - undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang antara lain:

- a. Kurang adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terkait Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima sangat tinggi;
- b. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif bagi Pelaku UMKM dan Koperasi
- c. Krisis keuangan dan perekonomian global serta dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Nasional dan daerah.
- d. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
- e. Sumberdaya manusia
Keterbatasan kemampuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkoperasian serta pemahaman tentang wawasan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan kurang memadai, sehingga berdampak kepada pengelolaan manajemen, produktifitas Koperasi dan UKM.
- f. Permodalan
Kemampuan pemupukan permodalan sendiri bagi anggota Koperasi dan UMKM masih terbatas dan Kemitraan dengan Perbankan dalam membuka terobosan usaha baru masih belum optimal.
- g. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

h. Kerjasama Usaha / Jaringan Usaha

Kerjasama antar koperasi baik vertikal maupun horisontal dengan badan usaha lain belum dapat berkembang, koperasi masih bekerja untuk kepentingan sendiri dan kurang mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi.

i. Pasar

Belum memanfaatkan peluang pasar yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM utamanya dalam pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistem kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Griya KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan Fasilitas Perkuatan Kemandirian Usaha Mikro dengan cara pembinaan atau bimtek;
- d. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan Wirausaha baru;
- e. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) meningkat;
- f. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PPK BLUD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang atau dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga non Bank;

- g. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK;
- h. Memberikan akses maupun pemahaman kepada KUMKM agar mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi dengan baik;
- i. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang arti pentingnya koperasi;

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman peinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku
- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan

- d. Adanya dukungan stakeholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
3. Tingkat kemiskinan masih tinggi didasari dengan angka kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 11.07%.
4. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
5. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
6. Pembangunan Pasar Rakyat di Pasar Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tahun 2016 merupakan masa transisi pemerintahan di Kabupaten Malang. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Mei 2016. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.
2. Adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi dan restrukturasi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah, maka perlu diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2017.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2017

NO	RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
A	BELANJA LANGSUNG				4,502,712,950	BELANJA LANGSUNG				4,532,161,000		
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	690,335,600	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	720,221,296		
	1.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	4250 Surat	175,650,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	4250 Surat	173,015,000	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan pada belanja benda pos
	1.2.	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	132 kali	60,940,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	132 kali	66,068,196	Ada kenaikan anggaran karena ada Gedung PLUT KUMKM tahun 2017
	1.3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	12 kali	52,540,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	12 kali	50,925,000	Ada penurunan anggaran karena ada perubahan pada perhitungan honorarium

1.4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	1 paket	47,591,500	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	1 paket	45,600,000	Ada penurunan anggaran karena disesuaikan dengan honorarium pegawai tidak tetap tenaga kebersihan
1.5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1 paket	72,771,500	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1 paket	67,665,500	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan pada belanja alat tulis kantor
1.6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	52,203,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	46,653,000	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan pada belanja cetak dan penggandaan
1.7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	1 paket	7,574,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	1 paket	8,574,100	Ada kenaikan anggaran karena ada kenaikan di belanja alat listrik dan elektronik
1.8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	1 eksemplar	3,900,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	1 eksemplar	2,880,000	Ada penurunan anggaran karena disesuaikan dengan harga bahan bacaan

	1.9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	1 paket	13,450,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	1 paket	11,328,000	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan pemakaian pada bahan minuman
	1.10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.350 pack	68,010,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.350 pack	101,557,500	Ada kenaikan anggaran karena ada perubahan pada makanan minuman harian pegawai
	1.11.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	10 orang	35,880,000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	10 orang	46,500,000	Ada kenaikan anggaran karena ada penambahan jumlah perjalanan dinas
	1.12.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	15 orang	99,825,000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	15 orang	99,455,000	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan jumlah belanja perjalanan dinas
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	124,120,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	189,954,304	
	2.1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	1 unit	19,000,004	Karena diperlukan untuk operasional kerja yang luas

2.2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	-	-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	3 unit	12,068,800	Karena ada pengadaan 3 kursi kerja pejabat sebagai pengganti kursi kerja pejabat yang rusak
2.3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	-	-	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	4 unit	28,312,500	Karena ada pengadaan CPU, printer, LCD proyektor
2.4.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	59,000,000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	58,478,000	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
2.5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	4 Unit	49,400,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	4 Unit	56,100,000	Ada kenaikan anggaran karena digunakan servis pengecatan mobil
2.6.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	1 paket	15,720,000	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	1 paket	12,755,000	ada penurunan belanja pemeliharaan komputer
2.7.	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang tersedia	1 unit	3,240,000	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mebeleur yang tersedia	1 unit	3,240,000	-

3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Cakupan pemenuhan kompetensi Disiplin Aparatur	-	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi Disiplin Aparatur	100%	27,860,000	
	3.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia	-	-	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia	1 unit	5,500,000	Diperlukan untuk control Disiplin kinerja ASN
	3.2	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	-	-	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	52 seragam	22,360,000	Diperlukan untuk meningkatkan semangat ASN dalam bekerja
4.		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	8,700,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	6,000,000	
	4.1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	11 orang	8,700,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	11 orang	6,000,000	Ada penurunan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	13,564,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	12,564,000	

	5.1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	3 jenis laporan	9,365,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	3 jenis laporan	10,365,000	Ada kenaikan anggaran karena ada kenaikan pada belanja cetak dan penggandaan
	5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Dokumen	4,199,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 Dokumen	2,199,000	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan pada belanja cetak dan penggandaan
6		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kab. Malang	Persentase Meningkatnya kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100%	570,616,500	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kab. Malang	Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100%	21,052,500	
	6.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab Malang	Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	27 koperasi/ KUD	21,052,500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab Malang	Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	27 koperasi/ KUD	21,052,500	

	6.2	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga kerja industry hasil tembakau	Kab Malang	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industry hasil tembakau	1.250 orang	550,000,000	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga kerja industry hasil tembakau	-	-	-	-	Dialihkan pada kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembkaou
7.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kab. Malang	Persentase Cakupan SDM KUMKM dalam pengembanagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100%	1,866,651,000	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kab. Malang	Cakupan SDM KUMKM dalam pengembanagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	100%	1,631,430,000	
	7.1	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab Malang	Jumlah Peserta (pengurus dan anggota koperasi) Bimtek dalam Terjalannya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian.	70 koperasi	116,651,000	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab Malang	Jumlah Peserta (pengurus dan anggota koperasi) Bimtek dalam Terjalannya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian.	70 koperasi	121,430,000	Ada kenaikan anggaran karena ada perubahan pada jumlah honorarium narasumber, instruktur dan pakar

	7.2	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembkaou	Kab Malang	Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	2.000 orang	1,550,000,000	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembkaou	Kab Malang	Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	1.500 orang	1,510,000,000	Ada penurunan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan
	7.3	Pendataan UMKM potensi ekspor	Kab Malang	Jumlah UMKM potensi ekspor yang terdata	200 UMKM	200,000,000	Pendataan UMKM potensi ekspor	Kab Malang	Jumlah UMKM potensi ekspor yang terdata	-	-	Dibatalkan karena belum ada perencanaan kegiatan yang matang
8		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Malang	Persentase Cakupan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	100%	600.329.850	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Malang	Cakupan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	100%	1,295,513,900	
	8.1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kab Malang	Jumlah koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	-	-	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kab Malang	Jumlah koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	90 koperasi	41,544,800	Diperlukan karena belum ada kegiatan yang menyediakan informasi tentang penyediaan permodalan khususnya KUR

8.2	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Kab Malang	Jumlah koperasi yang dipantau yang menerima dana pemerintah	210 koperasi	65,893,300	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Kab Malang	Jumlah koperasi yang dipantau yang menerima dana pemerintah	200 koperasi	54,192,850	Ada penurunan anggaran karena ada penurunan jumlah sasaran kegiatan
8.3	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab Malang	Jumlah fasilitasi promosi dan pameran UMKM dan Koperasi	100 KUMKM	250,000,000	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab Malang	jumlah Sarana dan prasarana Gedung PLUT-KUMKM	1 paket	600,000,000	Dibutuhkan karena pembangunan Gedung PLUT sudah selesai dibangun pada akhir tahun 2016 dan perlu adanya sarana dan prasarana gedung PLUT
8.4	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Kab Malang	jumlah Sarana dan prasarana Gedung PLUT-KUMKM	1 Paket	150,000,000	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Kab Malang	jumlah orang yang diberikan Layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UKM)	300 orang	315,058,200	Adanya penambahan belanja sewa stand tingkat provinsi dan nasional untuk promosi UMKM
8.5	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab Malang	jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan	325 KUMKM	80,000,000	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab Malang	jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk-Produk UKM di	5 KUMKM	103,600,000	Adanya penambahan karena untuk sewa stand pameran

				Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pameran di Tingkat Nasional					Pameran di Tingkat Nasional			
8.6	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Kab Malang	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan retail dan Bimtek pengembangan usaha PKL	8 KUMKM	33,686,550	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Kab Malang	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan retail dan Bimtek pengembangan usaha PKL	70 koperasi	165,000,000	Adanya penambahan anggaran karena ada penambahan sasaran kegiatan	
8.7	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Kab Malang	Jumlah koperasi penerima dana pemerintah yang di monitoring dan dievaluasi	70 koperasi	20,750,000	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Kab Malang	Jumlah koperasi penerima dana pemerintah yang di monitoring dan dievaluasi	35 koperasi	16,118,050	Adanya penurunan anggaran karena ada penurunansasaran kegiatan	
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kab. Malang	Persentase Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	100%	288,396,000	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kab. Malang	Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	100%	302,565,000		
9.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang diberikan Bimtek pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi	160 Koperasi Wanita	76,536,500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang diberikan Bimtek pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi	140 Koperasi Wanita	69,915,000	Adanya penurunan anggaran karena ada penurunansasaran kegiatan	

	9.2	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah KEP (kelompok Ekonomi Produktif) yang diberikan Bimtek perkoperasian	110 orang/10 KEP	35,350,000	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kab Malang	Jumlah KEP (kelompok Ekonomi Produktif) yang diberikan Bimtek perkoperasian	220 orang/10 KEP	150,000,000	Adanya peningkatan anggaran karena ada peningkatan sasaran kegiatan
	9.3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab Malang	Jumlah koperasi yang berprestasi dan mendapat penghargaan	5 Koperasi	42,798,500	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Kab Malang	Jumlah koperasi yang berprestasi dan mendapat penghargaan	5 Koperasi	42,230,000	Adanya penurunan anggaran karena disesuaikan dengan belanja cetak dan penggandaan
	9.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan administrasi	180 Koperasi /KSP/USP	57,711,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan administrasi	180 Koperasi /KSP/USP	40,420,000	Adanya penurunan anggaran karena disesuaikan dengan belanja cetak dan penggandaan
				Jumlah Koperasi syariah yang diberikan penilaian kesehatan administrasi	146 kop syariah	76,000,000			Jumlah Koperasi syariah yang diberikan penilaian kesehatan administrasi	-	-	Kegiatan sudah ada pada kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
10		Program Peningkatan Pelayanan	Kab. Malang	Persentase Tingkat kelancaran pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	100%	340,000,000	Program Peningkatan Pelayanan	Kab. Malang	Tingkat kelancaran pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	100%	325,000,000	

10. 1	Kegiatan Pendukung Pelayanan	Kab Malang	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	140 UMKM dan 5 Koperasi	360,000,000	Kegiatan Pendukung Pelayanan	Kab Malang	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	140 UMKM dan 5 Koperasi	325,000,000	Adanya penurunan anggaran karena ada penurunan pada belanja jasa service dan belanja cetak dan penggandaan
Jumlah					4,502,712,950	Jumlah					4,532,161,000

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Kec. Singosari, Kec Gondanglegi	Terciptanya perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	10 unit gergaji meja,mesin pengolah & 1 unit alat potong, 2000 m2	Tidak dapat dicukupi karena ada Permendagri no 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan diganti dengan kegiatan bimbingan teknis tentang optimalisasi dan pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktivitas usaha serta kemudahan pelayanan KUMKM
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kec. Donomulyo, Kec. Pagak, Kec. Bantur, Kec. Gedangan, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading, Kec. Turen, Kec. Pagelaran, Kec. Sumberpucung, Kec. Kromengan, Kec. Wonosari, Kec. Wgir, Kec. Tajinan, Kec.	Meningkatnya jumlah wirausaha yang terlatih di Kabupaten Malang serta meningkatnya produk unggulan hasil usaha kecil menengah	1250 orang,62 paket,152 kel,119 unit,1 set, 2 kop,30 kk,4 dusun	Dicukupi pada kegiatan pembinaan Kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

		Tumpang, Kec. Singosari, Kec. Karangploso, Kec. Dau, Kec. wajak, Kec Dampit, Kec Poncokusumo, Kec Gondanglegi, Kec Kepanjen Kec Ngajum, Kec Jabung, Kec Pujon, Kec Ngantang, Kec Kasembon, Kec Lawang.			
3	Program Pengembangan Sitem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kec. Poncokusumo, Kec. Wonosari.	Meningkatnya akses pasar bagi KUMKM	1 paket, 111 orang, 1 kel	Dicukupi pada kegiatan promosi produk KUMKM tingkat kabupaten, Provinsi dan nasional
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Kec. Pagak, Kec. Bantur, Kec. Ngajum, Kec. Pakisaji, Kec. Tajinan, Kec. Wonosari, Kec Ampelgading, kec. Pagelaran, Kec Kepanjen, Kec Karangploso, Kec Dau Kec Dampit, Kec Kromengan, Kec Singosari, Kec Kalipare, Kec Gedangan, kec Sumber manjing wetan, Kec ngantang, kec Lawang	Meningkatnya profesionalisme kelembagaan koperasi serta menciptakan lembaga koperasi yang sehat	20 unit,221 anggota,20 kel,12 paket,2 kopwan,160 orang,1 kop, 4 dusun	Dicukupi pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian kepada 140 kopwan,pada kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 10 Kelompok Ekonomi Produktif melalui Bimbingan teknis perkoperasian

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Koperasi di era Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 yang mana selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Koperasi dan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, dan pada kebijakan ini pemerintah berharap dalam mengelola urusan pemeritahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang salah satu dinas teknis di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

a. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi

wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik.

2. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.

b. Sasaran

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya jumlah koperasi Aktif.
2. Meningkatnya jumlah Usaha mikro Kecil dan menengah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan melihat Lampiran Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2017 telah disesuaikan dengan anggaran dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran;
 - (1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - (2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
 - (4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - (5) Penyediaan alat tulis kantor
 - (6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - (7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - (8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - (9) Penyediaan bahan logistik kantor
 - (10) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - (11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - (12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - (1) Pengadaan Kendaraan dinas operasional
 - (2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- (3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - (4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - (5) Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - (6) Pemeliharaan Rutin/ berkala Peraltan kantor
 - (7) Pemeliharaan Rutin/ berkala mebeleur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - (1) Pengadaan Mesin/kartu absensi
 - (2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - (1) Laporan kinerja PD
 - (2) Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
 6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - (1) Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - (1) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
 - (2) Pembinaan da pelatihan ketramp[ilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
 8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - (1) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
 - (2) Koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
 - (3) Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - (4) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri menengah
 - (5) Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 - (6) Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
 - (7) Kegiatan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana Pemerintah bagi koperasi
 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- (2) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
- (3) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10. Program Peningkatan Pelayanan

- (1) Kegiatan Pendukung Pelayanan

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.11.2.11.1.01	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	720,221,296	APBD		100%	720,221,296
2.11.2.11.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	4250 Surat	173,015,000	APBD		4250 Surat	173,015,000
2.11.2.11.1.01.02	Sumber Daya ,Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	132 kali	66,068,196	APBD		132 kali	66,068,196
2.11.2.11.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	12 kali	50,925,000	APBD		12 kali	50,925,000
2.11.2.11.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Griya UMKM Kab. Malang	1 paket	45,600,000	APBD		1 paket	45,600,000
2.11.2.11.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 paket	67,665,500	APBD		1 paket	67,665,500
2.11.2.11.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 paket	46,653,000	APBD		1 paket	46,653,000
2.11.2.11.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 paket	8,574,100	APBD		1 paket	8,574,100
2.11.2.11.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 eksemplar	2,880,000	APBD		1 eksemplar	2,880,000

2.11.2.11.1.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 paket	11,328,000	APBD		1 paket	11,328,000
2.11.2.11.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1.350 pack	101,557,500	APBD		1.350 pack	101,557,500
2.11.2.11.1.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	10 orang	46,500,000	APBD		10 orang	46,500,000
2.11.2.11.1.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	15 orang	99,455,000	APBD		15 orang	99,455,000
2.11.2.11.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	189,954,304	APBD		100%	189,954,304
2.11.2.11.1.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang tersedia	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 unit	19,000,004	APBD		1 unit	19,000,004
2.11.2.11.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	3 unit	12,068,800	APBD		3 unit	12,068,800
2.11.2.11.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	4 unit	28,312,500	APBD		4 unit	28,312,500
2.11.2.11.1.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	3 Unit	58,478,000	APBD		3 Unit	58,478,000
2.11.2.11.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	4 Unit	56,100,000	APBD		4 Unit	56,100,000
2.11.2.11.1.02.28	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 paket	12,755,000	APBD		1 paket	12,755,000
2.11.2.11.1.02.29	Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 unit	3,240,000	APBD		1 unit	3,240,000
2.11.2.11.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Cakupan pemenuhan kompetensi Disiplin Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	27,860,000	APBD		100%	27,860,000

2.11.2.11.1.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi yang tersedia	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 unit	5,500,000	APBD		1 unit	5,500,000
2.11.2.11.1.03.05	Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	52 seragam	22,360,000	APBD		52 seragam	22,360,000
2.11.2.11.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	6,000,000	APBD		100%	6,000,000
2.11.2.11.1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	11 orang	6,000,000	APBD		11 orang	6,000,000
2.11.2.11.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	100%	12,564,000	APBD		100%	12,564,000
2.11.2.11.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	3 jenis laporan	10,365,000	APBD		3 jenis laporan	10,365,000
2.11.2.11.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	1 Dokumen	2,199,000	APBD		1 Dokumen	2,199,000
2.11.2.11.1.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi KUMKM	Kab. Malang	100%	21,052,500	APBD		100%	21,052,500
2.11.2.11.1.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	Kab Malang	27 koperasi/KUD	21,052,500	APBD		27 koperasi/KUD	21,052,500
2.11.2.11.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Cakupan SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	Kab. Malang	100%	1,631,430,000	APBD		100%	1,631,430,000

2.11.2.11.1.16.03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Peserta (pengurus dan anggota koperasi) Bimtek dalam Terjalannya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian.	Kab Malang	70 koperasi	121,430,000	APBD		70 koperasi	121,430,000
2.11.2.11.1.16.11	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta Ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Kab Malang	1.500 orang	1,510,000,000	APBD		1.500 orang	1,510,000,000
2.11.2.11.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Cakupan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	Kab. Malang	100%	1,295,513,900	APBD		100%	1,295,513,900
2.11.2.11.1.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kab Malang	90 koperasi	41,544,800	APBD		90 koperasi	41,544,800
2.11.2.11.1.17.03	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah koperasi yang dipantau yang menerima dana pemerintah	Kab Malang	200 koperasi	54,192,850	APBD		200 koperasi	54,192,850
2.11.2.11.1.17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah Sarana dan prasarana Gedung PLU-KUMKM	Kab Malang	1 paket	600,000,000	DBHCT (Blockgrant)		1 paket	600,000,000
2.11.2.11.1.17.08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	jumlah orang yang diberikan Layanan berupa Fasilitas, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UKM)	Kab Malang	300 orang	315,058,200	APBD		300 orang	315,058,200
2.11.2.11.1.17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah UMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk- Produk UKM di Pameran di Tingkat Nasional	Kab Malang	5 KUMKM	103,600,000	APBD		5 KUMKM	103,600,000
2.11.2.11.1.17.10	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan retail dan Bimtek pengembangan usaha PKL	Kab Malang	70 koperasi	165,000,000	DBHCT (Blockgrant)		70 koperasi	165,000,000

2.11.2.11.1.17.12	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah koperasi penerima dana pemerintah yang di monitoring dan dievaluasi	Kab Malang	35 koperasi	16,118,050	APBD		35 koperasi	16,118,050
2.11.2.11.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	Kab. Malang	100%	302,565,000	APBD		100%	302,565,000
2.11.2.11.1.18.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang diberikan Bimtek pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi	Kab Malang	140 Koperasi Wanita	69,915,000	APBD		140 Koperasi Wanita	69,915,000
2.11.2.11.1.18.04	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah KEP (kelompok Ekonomi Produktif) yang diberikan Bimtek perkoperasian	Kab Malang	220 orang/10 KEP	150,000,000	DBHCT (Blockgrant)		220 orang/10 KEP	150,000,000
2.11.2.11.1.18.05	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang berprestasi dan mendapat penghargaan	Kab Malang	5 Koperasi	42,230,000	APBD		5 Koperasi	42,230,000
2.11.2.11.1.18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan administrasi	Kab Malang	180 Koperasi/KSP/USP	40,420,000	APBD		180 Koperasi/KSP/USP	40,420,000
	Program Peningkatan Pelayanan	Tingkat kelancaran pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	Kab. Malang	100%	325,000,000	APBD		100%	325,000,000
	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	Kab Malang	140 UMKM dan 5 Koperasi	325,000,000	DAU		140 UMKM dan 5 Koperasi	325,000,000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan guna mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai prinsip-prinsip Perkoperasian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2017 Rencana Kerja ini terdapat 10 program dan 39 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2017. Rencana kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2017 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang serta sebagai penunjang pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

MADE DEWI ANGGRAENI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan 1:		
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik		
Sasaran 1.1 :		
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\sum \text{koperasi Aktif} \times 100\%}{\sum \text{Koperasi}}$
Program 1:		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	$\sum \text{koperasi yang diberikan bimbingan Teknis}$
Tujuan 2:		
Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang		
Sasaran 2.1 :		
Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM	$\frac{\sum \text{UMKM Tahun (n)} - \sum \text{UMKM Tahun (n-1)} \times 100\%}{\sum \text{UMKM Tahun (n-1)}}$
Program 2:		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Cakupan pemenuhan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	$\sum \text{KUMKM yang difasilitasi promosi}$
Program 3:		
Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan pemenuhan pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	$\sum \text{KUMKM yang diberikan bantuan dana bergulir}$
Program 4:		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	$\sum \text{KUMKM yang diberikan bimbingan teknis}$
Program 5:		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Cakupan SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	$\sum \text{KUMKM yang diberikan bimbingan teknis}$